



KANTOR
KARANTINA PERIKANAN

2025 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Balai KIPM Entikong



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu “Menyelenggarakan dan melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam RENSTRA 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikat, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian, dan monitoring;
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan;
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Salah satu upaya Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah yang diimplementasikan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang berfungsi sebagai *guidance* perencanaan pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan dan target yang direncanakan akan dicapai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada tahun anggaran 2025.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada tahun anggaran 2025 disusun agar dapat digunakan sesuai dengan peruntutukannya.

Entikong, 29 Januari 2025

Bp. Kepala Balai KIPM Entikong,



Eko Trismiyarto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Keterkaitan RKT dan RENSTRA.....	5
BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2025	7
A. Tujuan Strategis	7
B. Sasaran Program dan IKU serta target	7
B. Evaluasi Kinerja	8
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka pembangunan BKIPM merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Era perdagangan bebas telah membuka peluang yang besar bagi Indonesia untuk memasarkan komoditi perikanan yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Dengan semakin meningkatnya lalu lintas perdagangan di pasar global maka mempengaruhi tajamnya persaingan pasar domestik sebagai bagian dari pasar dunia. Selain itu perekonomian suatu negara yang menyatu dengan perekonomian negara lainnya menimbulkan bebasnya arus barang.

Kabupaten Sanggau khususnya Entikong merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan Negara Malaysia yang diharapkan dapat berperan sebagai “*security belt*” dan merupakan pintu gerbang utama bagi lalu lintas manusia, barang termasuk ikan yang memberikan sejumlah peluang dan sekaligus tantangan bagi upaya pengembangan wilayah tersebut.

Mengantisipasi perkembangan kedepan dalam pengembangan usaha perikanan dan upaya menjamin kelestarian sumberdaya ikan dari serangan hama dan penyakit ikan maka keberadaan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong sangat diperlukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengendalian mutu dan keamanan hasil

perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tetap proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara. Dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan Perpres nomor 2 tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Perpres nomor 38 tahun 2023 dalam organisasi dan tata kerja, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan disetiap rantai pasok melalui *quality assurance*, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan tahun 2025;
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Manfaat penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025 yaitu :

1. Sebagai acuan dan panduan :
 - a. Menjamin pencapaian tujuan : Rencana Kerja Tahunan memberikan gambaran rinci tentang tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, sasaran, dan kewajiban organisasi dapat tercapai dengan tingkat kepasian dan risiko yang kecil;
 - b. Mengarahkan program : Dokumen Rencana Kerja Tahunan menjadi panduan bagi instansi atau sekolah untuk mencapai target peningkatan kualitas yang spesifik dalam jangka pendek.
2. Mendukung proses perencanaan dan penganggaran :
 - a. Dasar anggaran : Rencana Kerja Tahunan menjadi dasar untuk menyusun dokumen kegiatan dan anggaran, memastikan keteraitan antara perencanaan dengan penganggaran;

- b. Mendorong sinergi : Rencana Kerja Tahunan menjaga konsistensi, keterpaduan, dan sinergi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pengawasan kinerja.
- 3. Alat akuntabilitas dan transparansi :
 - a. Transparansi kinerja : Rencana Kerja Tahunan menjadi media akuntabilitas kinerja yang transparan karena program perencanaan unit kerja diekspos secara spesifik, terukur, dan legitimate;
 - b. Mengukur keberhasilan : Rencana Kerja Tahunan berfungsi sebagai tolak ukur atau indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan mutu.
- 4. Mendorong evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan :
 - a. Basis evaluasi : Dokumen Rencana Kerja Tahunan dapat digunakan sebagai dasar penilaian pencapaian kinerja tahunan dan sebagai alat untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi program;
 - b. Pelajaran untuk masa depan : melalui Rencana Kerja Tahunan, organisasi dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target, sehingga dapat mengambil pelajaran berharga untuk perencanaan di tahun berikutnya.
- 5. Meningkatkan partisipasi dan efisiensi sumber daya
 - a. Partisipasi pegawai : penyusunan Rencana Kerja Tahunan mendorong partisipasi seluruh pegawai dalam proses perencanaan;
 - b. Optimalisasi sumber daya : Rencana Kerja Tahunan membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025 adalah tersedianya Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025-2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dan gambaran kinerja yang akan dicapai Balai

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025.

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut dan mengakomodir seluruh seluruh aktivitas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong, maka perlu dirumuskan secara jelas dan terperinci suatu program kerja melalui Rencana Kerja Tahunan.

B. Keterkaitan RKT dan RENSTRA

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029. Dalam Renstra 2025-2029, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong yang merupakan bagian integral dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah merumuskan visi yang juga tentunya tidak lepas dari idealisme dan cita-cita Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai organisasi Induk. Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 di bidang Kelautan dan Perikanan adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu “Menyelenggarakan dan melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam RENSTRA 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikat, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian, dan monitoring;
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan;
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis akan dapat lebih menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Dalam pencapaian Rencana Strategis selama lima tahun, maka dibuat penjabarannya dalam setiap tahun melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan/subkegiatan berdasarkan anggaran yang ditetapkan.

Perumusan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong tahun 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategik ke dalam rencana kinerja tahunan yang berorientasi akuntabilitas melalui Rencana Aksi.

BAB II**RENCANA KINERJA TAHUN 2025****A. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis menjelaskan hasil yang hendak dicapai dari implementasi langkah-langkah kegiatan sebagaimana tercantum dalam pernyataan misi. Dengan diformulasinya tujuan strategis ini, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu satu tahun.

Penetapan tujuan strategis dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta mengantisipasi berbagai peluang, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. Tujuan strategis ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk pengukuran sejauh mana visi dan misi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong telah dicapai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, tujuan strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Adanya peningkatan kerja pengawasan dan pemeriksaan HPI/HPIK pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong secara visual dan laboratoris.
- Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan HPI/HPIK yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan RENSTRA 2025-2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi outcome / impact yang ingin dicapai Balai KIPM Entikong telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program

tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong. Sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target pencapaiannya Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong disajikan dalam tabel berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Entikong (Indeks)	87
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Entikong (Nilai)	88

C. Evaluasi Kinerja

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep **Value for Money**. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- Indikator keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah ~~dicapainya~~ maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar *output* akan menghasilkan *outcome* dinamakan efektif. Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian.

Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun Anggaran 2025. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

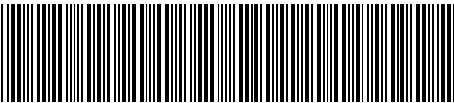
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DIPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong tahun 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategik ke dalam rencana kinerja tahunan yang berorientasi akuntabilitas. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan realisasi target dari sasaran program dan indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong tahun 2025 kami susun, agar dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 032.13.2.567538/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (032) | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (13) | BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3. Provinsi | : | (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (567538) | STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK |
| Sebesar | : | Rp. 8.073.187.000 | (DELAPAN MILIAR TUJUH PULUH TIGA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	7.855.395.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	217.792.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN PONTIANAK | (042) Rp. | 8.073.187.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

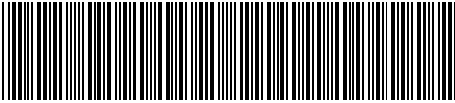
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025

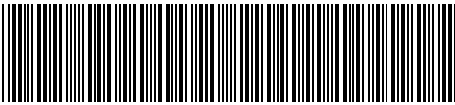


DS:0342-6613-0555-6140

Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	399.000.000
EC.3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp.	250.000.000
EC.7010	Manajemen Mutu	Rp.	149.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	7.674.187.000
WA.3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	Rp.	7.674.187.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
I A. INFORMASI KINERJA



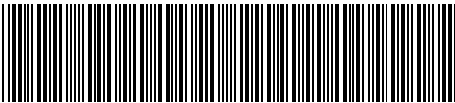
DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			399.000.000	
Kegiatan	:	3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			250.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar				
		2. 02	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)				
		3. 03	Persentase MOU/MRA sistim jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan				
		4. 04	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan				
		5. 05	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan				
		6. 06	Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan				
		7. 07	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan				
		8. 08	Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,00	Produk, Laporan, Keputusan	5.000.000
Rincian Output	:	01	BIA.001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	1.00	Produk	5.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3989.PDC	Sertifikasi Produk	16,00	produk, Sertifikat	130.000.000
Rincian Output	:	01	PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang (PN) divalidasi	16.00	produk	130.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3989.PDF	Sertifikasi Lembaga	10,00	Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	95.000.000
Rincian Output	:	01	PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang (PN) divalidasi	10.00	Lembaga	95.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
I A. INFORMASI KINERJA

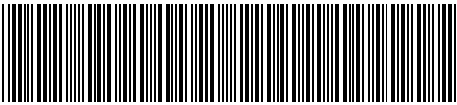


DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

Klasifikasi Rincian Output	4	:	3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan Lembaga	20.000.000
Rincian Output	:	01	QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PN)	12.00		20.000.000
Kegiatan	:	7010		Manajemen Mutu			149.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1.	01	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.			
		2.	02	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi			
		3.	03	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium			
		4.	04	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			
		5.	05	Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir			
		6.	06	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000
Rincian Output	:	01	ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Orang, Kegiatan	8.500.000
Rincian Output	:	01	DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.00	Kegiatan	8.500.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	95.000.000
Rincian Output	:	01	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	95.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
I A. INFORMASI KINERJA

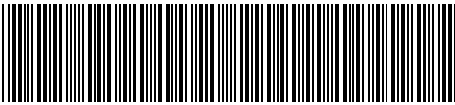


DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

Klasifikasi Rincian Output	8	:	7010.PDD	Standarisasi Lembaga		2,00	Lembaga, Unit Kerja	35.000.000
Rincian Output		:	01	PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (PN)	1.00	Lembaga	25.000.000
		:	02	PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium (PN)	1.00	Lembaga	10.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		1,00	Produk, Laporan, Keputusan	8.500.000
Rincian Output		:	01	QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (PN)	1.00	Produk	8.500.000
Program		:	032.13.WA	Program Dukungan Manajemen				7.674.187.000
Kegiatan		:	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan				7.674.187.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Nilai Kinerja Anggaran				
		:	2. 02	Indeks Profesionalitas ASN				
		:	3. 03	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				
		:	4. 04	Nilai PM SAKIP				
		:	5. 05	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP				
		:	6. 06	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan				
		:	7. 07	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK				
		:	8. 08	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat				
		:	9. 09	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.519.707.000
Rincian Output		:	01	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	214.480.000
		:	02	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	7.305.227.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
I A. INFORMASI KINERJA

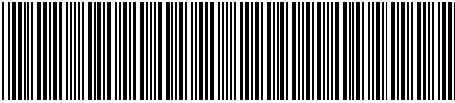


DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

Layanan Dukungan Manajemen Internal					Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	154.480.000
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	110.688.000
		02	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	43.792.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0342-6613-0555-6140

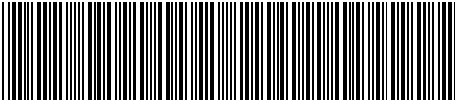
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	8.073.187.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	7.855.395.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	217.792.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



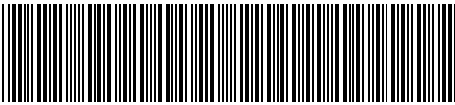
DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	4.490.112	3.583.075	-	-	-	8.073.187	13 . 04	
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	399.000	-	-	-	399.000		
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	-	250.000	-	-	-	250.000		
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	5.000	-	-	-	5.000		
01 RM		-	5.000	-	-	-	5.000		
3989.PDC	Sertifikasi Produk (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	130.000	-	-	-	130.000		
01 RM		-	100.000	-	-	-	100.000		
04 PNB		-	30.000	-	-	-	30.000		
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	95.000	-	-	-	95.000		
01 RM		-	15.000	-	-	-	15.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



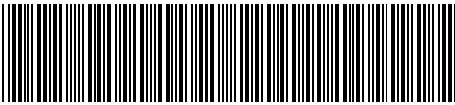
DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
04 PNB		-	80.000	-	-	-	80.000	042@	
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	20.000	-	-	-	20.000	13 . 04	
	(13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)								
04 PNB		-	20.000	-	-	-	20.000	042@	
7010	Manajemen Mutu	-	149.000	-	-	-	149.000		
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	-	2.000	-	-	-	2.000	13 . 04	
	(13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)								
04 PNB		-	2.000	-	-	-	2.000	042@	
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	-	8.500	-	-	-	8.500	13 . 04	
	(13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)								
04 PNB		-	8.500	-	-	-	8.500	042@	
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	-	95.000	-	-	-	95.000	13 . 04	
	(13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)								
01 RM		-	95.000	-	-	-	95.000	042	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

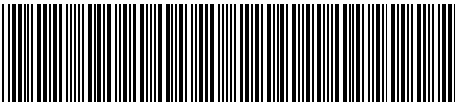


DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7010.PDD	Standarisasi Lembaga (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	35.000	-	-	-	35.000	13 . 04	
01 RM		-	10.000	-	-	-	10.000	042	
04 PNBP		-	25.000	-	-	-	25.000	042@	
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	8.500	-	-	-	8.500	13 . 04	
04 PNBP		-	8.500	-	-	-	8.500	042@	
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	4.490.112	3.184.075	-	-	-	7.674.187		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	4.490.112	3.184.075	-	-	-	7.674.187		
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	4.490.112	3.029.595	-	-	-	7.519.707	13 . 04	
01 RM		4.490.112	3.029.595	-	-	-	7.519.707	042	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

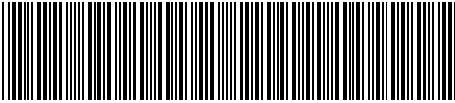
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	154.480	-	-	-	154.480	13 . 04	
01 RM		-	110.688	-	-	-	110.688	042	
04 PNBP		-	43.792	-	-	-	43.792	042@	
JUMLAH		4.490.112	3.583.075	-	-	-	8.073.187		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan danPerikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

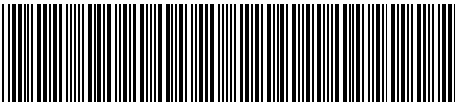
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK														
		RENCANA PENARIKAN DANA	672.691	672.691	672.691	672.691	672.691	672.691	672.691	672.691	672.691	672.691	672.691	673.586	8.073.187	
		BELANJA PEGAWAI	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.330	4.490.112	
	032.13.EC.3989	BELANJA BARANG	298.529	298.529	298.529	298.529	298.529	298.529	298.529	298.529	298.529	298.529	298.529	298.529	299.256	3.583.075
		Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.991	250.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.819	20.991	250.000
	032.13.EC.7010	Manajemen Mutu	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.523	149.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.523	149.000
	032.13.WA.3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	639.465	639.465	639.465	639.465	639.465	639.465	639.465	639.465	639.465	639.465	639.465	639.465	640.072	7.674.187
		51 BELANJA PEGAWAI	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.162	374.330	4.490.112
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.742	3.184.075
		PERKIRAAN PENERIMAAN	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.762	141.100
		- PNPB (425289)	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.762	141.100

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan danPerikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
IV A. B L O K I R



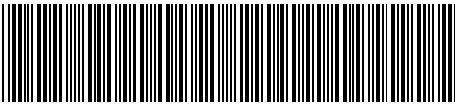
DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [567538] STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	7010	Manajemen Mutu
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 217.792	7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
	52 Belanja Barang Rp. 217.792	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		Arahan Presiden dalam sidang kabinet
3989.PDC	Sertifikasi Produk	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden dalam sidang kabinet
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	7010.PDD	Standarisasi Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 348	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.652	7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Arahan Presiden dalam sidang kabinet
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.550	032.13.WA	Program Dukungan Manajemen
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.450		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.639
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet		belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
IV A. B L O K I R



DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [567538] STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

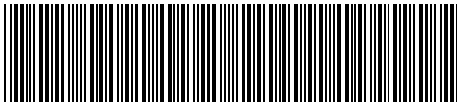
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.049 Arahan Presiden dalam sidang kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.800 Arahan Presiden dalam sidang kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.304 Arahan Presiden dalam sidang kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan danPerikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.13.2.567538/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0342-6613-0555-6140

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [13] BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [567538] STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan danPerikanan

ttd.
Ishartini
NIP. 196605141993032001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 8,073,187,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC 3989 3989.BIA	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		399,000,000 250,000,000 5,000,000	
3989.BIA.001 052 A 521211	Lokasi : KAB. MEMPAWAH Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya Koordinasi Penanganan kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan Koordinasi Penanganan KAsus penahanan/Penolakan Produk Perikanan Belanja Bahan (KPPN.042-Pontianak) - ATK	1.0 Produk		5,000,000 5,000,000 5,000,000 122,000	U A RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.042-Pontianak) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KALIMANTAN BARAT) [3 OK x 2 malam] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Barat)	1.0 Pkt 6.0 OH 3.0 OH	122,000 538,000 380,000	122,000 4,368,000 3,228,000 1,140,000	* A * *
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.042-Pontianak) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	3.0 OK	170,000	510,000 510,000	A *
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	16.0 produk, Sertifikat		130,000,000	
3989.PDC.002 051 A 524111	Lokasi : KAB. MEMPAWAH Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi Validasi produk pada sektor produksi pasca panen Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.042-Pontianak) > Rapat Teknis Pelaksanaan Validasi SPDI - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OK x 3 Hari] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 OK x 4 Hari] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK > Perdin Inspeksi SPDI - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [9 OK x 2 Hari] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [10 OK x 3 Hari] - Satuan Biaya Transporatasi darat [10 OK x 2 PP] Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	16.0 produk		130,000,000 130,000,000 30,000,000 30,000,000 6,400,000 1,500,000 2,120,000 2,780,000 23,600,000 7,200,000 11,400,000 5,000,000 50,000,000	U A A * * * * * * * * *
B					PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 8,073,187,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.042-Pontianak)			152,000	A
	- ATK	1.0 Pkt	152,000	152,000	*
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.042-Pontianak)			49,848,000	A
	> Rapat Teknis Pelaksanaan Validasi SKP			26,848,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [4 OK x 3 Hari]	12.0 OH	604,000	7,248,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [4 OK x 4 Hari]	16.0 OH	530,000	8,480,000	*
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	4.0 OK	2,780,000	11,120,000	*
	> Perdin Validasi SKP			23,000,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas m [10 OK x 2 Hari]	20.0 OH	380,000	7,600,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [10 OK x 3 Hari]	30.0 OH	380,000	11,400,000	
	- Satuan Biaya Transporatasi darat [10 OK x 2 PP]	20.0 OK	200,000	4,000,000	*
C	<i>Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI</i>			50,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.042-Pontianak)			48,200,000	A
	> Surveillen /Inspeksi HACCP			34,980,000	
	- Uang Harian Perdin Surveillen/Inspeksi UPI Luar kota [11 upi x 3 org x 2 hari]	66.0 OK	380,000	25,080,000	*
	- Penginapan Surveillen / Inspeksi UPI [11 UPI x 3 Org x 1 Mlm]	33.0 OK	300,000	9,900,000	*
	> Perdin Pelatihan HACCP Dasar			6,520,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OK x 3 Hari]	3.0 OH	540,000	1,620,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 OK x 4 Hari]	4.0 OH	530,000	2,120,000	*
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	1.0 OK	2,780,000	2,780,000	*
	> Perdin Pelatihan No Reg			6,700,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OK x 3 Hari]	3.0 OH	600,000	1,800,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 OK x 4 Hari]	4.0 OH	530,000	2,120,000	*
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	1.0 OK	2,780,000	2,780,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.042-Pontianak)			1,800,000	A
	- Perdin Tanspor Dalam Kota Surveilen Upi [2 upi x 2 org x 2 kali]	8.0 OK	150,000	1,200,000	*
	- Transport Lokal Inspeksi UPI/Perpanjangan HACCP [2 UPI x 2 Org]	4.0 OK	150,000	600,000	*
3989.PDF	<u>Sertifikasi Lembaga[Base Line]</u>	10.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		95,000,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KAB. MEMPAWAH				
051	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	10.0 Lembaga		95,000,000	
	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			95,000,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567538)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 8,073,187,000	

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan			40,000,000	
521211	Belanja Bahan			174,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	- atk [0 0 x 0 0]	1.0 Pkt	174,000	174,000	* PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			39,826,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	> Rapat Teknis Pelaksanaan CBIB			13,426,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 OK x 3 Hari]	6.0 OH	604,000	3,624,000	* PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 OK x 4 Hari]	8.0 OH	530,000	4,240,000	* PNP
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	2.0 OK	2,781,000	5,562,000	* PNP
	> Perdin Inspeksi CBIB			26,400,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas m [10 OK x 2 Hari]	20.0 OH	450,000	9,000,000	* PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [10 OK x 3 Hari]	30.0 OH	380,000	11,400,000	* PNP
	- Satuan Biaya Transporatasi darat [10 OK x 2 PP]	20.0 OK	300,000	6,000,000	* PNP
B	Sertifikasi CPIB pada Pembenihan			15,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15,000,000	RM
	(KPPN.042-Pontianak)				
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [10 OK x 2 Hari]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [10 OK x 2 Hari]	20.0 OH	350,000	7,000,000	
	- Satuan Biaya Transporatasi darat [5 OK x 2 PP]	10.0 OK	200,000	2,000,000	
C	Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan			40,000,000	
521211	Belanja Bahan			174,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	- atk [0 0 x 0 0]	1.0 Pkt	174,000	174,000	* PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			39,826,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	> Bmtek/TOT CPIB Kapal			13,426,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 OK x 3 Hari]	6.0 OH	604,000	3,624,000	* PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 OK x 4 Hari]	8.0 OH	530,000	4,240,000	* PNP
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	2.0 OK	2,781,000	5,562,000	* PNP
	> Perdin Inspeksi CPIB Kapal			26,400,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas m [10 OK x 2 Hari]	20.0 OH	450,000	9,000,000	* PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [10 OK x 3 Hari]	30.0 OH	380,000	11,400,000	* PNP
	- Satuan Biaya Transporatasi darat [10 OK x 2 PP]	20.0 OK	300,000	6,000,000	* PNP
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	12.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		20,000,000	
	Lokasi : KAB. MEMPAWAH				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567538)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 8,073,187,000	

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	12.0 Lembaga		20,000,000	
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			20,000,000	U
B	Monev KEpatuhan Penerbitan HC Di UPI			14,170,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12,720,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [12 UPI x 1 MLM]	12.0 OH	300,000	3,600,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [12 UPI x 2 ORg x 1 Hari]	24.0 OH	380,000	9,120,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,450,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	10.0 OK	145,000	1,450,000	*
E	Temu Teknis Penerbitan HC			5,830,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,830,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	- Tiket Pesawat Jakarta - Pontianak PP	1.0 OK	2,780,000	2,780,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [1 OK x 2 MLM]	2.0 OH	730,000	1,460,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [1 OK x 3 HARI]	3.0 OH	530,000	1,590,000	*
7010	Manajemen Mutu			149,000,000	
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		2,000,000	

7010.ABR.001	Lokasi : KAB. MEMPAWAH				
051	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		2,000,000	
A	Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor			2,000,000	U
	Evaluasi Nomor Registrasi			2,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,000,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	- Transport Lokal Evaluasi UPI Teregristrasi Negara Mitra	20.0 OH	100,000	2,000,000	*
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Orang, Kegiatan		8,500,000	

7010.DCC.001	Lokasi : KAB. MEMPAWAH				
051	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.0 Kegiatan		8,500,000	
A	Peningkatan kompetensi inspektur mutu			8,500,000	U
	Bimtek Import Mutu			8,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8,500,000	A PNP
	(KPPN.042-Pontianak)				
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [1 OK x 5 Hari]	5.0 OH	600,000	3,000,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas [1 OK x 5 Hari]	5.0 OH	530,000	2,650,000	*
	- Transportasi dari bandara ke lokasi	1.0 OH	69,000	69,000	*
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	1.0 OK	2,781,000	2,781,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 8,073,187,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		95,000,000	
7010.PBR.001	Lokasi : KAB. MEMPAWAH Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		95,000,000	
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			95,000,000	U
A	Pemeliharaan ISO 17025			95,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.042-Pontianak)			43,500,000	A RM
	- Pendaftaran Reakreditasi [0 0 x 0 0]	1.0 Pkt	5,000,000	5,000,000	
	- Uji Profisiensi [0 0 x 0 0]	4.0 par	1,500,000	6,000,000	*
	- Uji banding/validasi [0 0 x 0 0]	5.0 pkt	1,000,000	5,000,000	*
	- CRM / Kontrol Positif [0 0 x 0 0]	5.0 pkt	1,000,000	5,000,000	*
	- Biaya Asesmen [0 0 x 0 0]	6.0 oh	3,500,000	21,000,000	*
	- Iuran Tahunan [0 0 x 0 0]	1.0 pkt	1,500,000	1,500,000	
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku (KPPN.042-Pontianak)			33,755,000	A RM
	- Bahan Laboratorium [0 0 x 0 0]	1.0 Pkt	33,755,000	33,755,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.042-Pontianak)			17,745,000	A RM
	> Perdin Asesor Reakreditasi 17025			17,745,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [3 OK x 3 Hari]	9.0 OH	538,000	4,842,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas [3 OK x 4 Hari]	12.0 OH	380,000	4,560,000	*
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	3.0 OK	2,781,000	8,343,000	*
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	2.0 Lembaga, Unit Kerja		35,000,000	
7010.PDD.001	Lokasi : KAB. MEMPAWAH Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.0 Lembaga		25,000,000	
051	Penerapan Standar Metode Pengujian			25,000,000	U
A	Sertifikasi iso 9001			25,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.042-Pontianak)			25,000,000	A PNP
	- Sertifikasi ISO 9001	1.0 Pkt	25,000,000	25,000,000	*
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		10,000,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			10,000,000	U
A	Asesmen ISO 17020			10,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.042-Pontianak)			3,000,000	A RM
	- Iuran Tahunan [0 0 x 0 0]	1.0 pkt	1,500,000	1,500,000	
	- Pertanggunggugatan inspeksi [0 0 x 0 0]	1.0 pkt	1,500,000	1,500,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567538)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 8,073,187,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku (KPPN.042-Pontianak) - Bahan Laboratorium [0 0 x 0 0]	1.0 pkt	7,000,000	7,000,000	A	RM
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		8,500,000	*	
7010.QIA.001	Lokasi : KAB. MEMPAWAH Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1.0 Produk		8,500,000		PNP
051	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			8,500,000	U	
A	Rapat Koordinasi QA			8,500,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.042-Pontianak) > Rapat Koordinasi QA			8,500,000	A	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [1 OK x 5 Hari]	5.0 OH	600,000	3,000,000	*	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas [1 OK x 5 Hari]	5.0 OH	530,000	2,650,000	*	
	- Transportasi dari bandara ke lokasi	1.0 OH	69,000	69,000	*	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi	1.0 OK	2,781,000	2,781,000	*	
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			7,674,187,000		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			7,674,187,000		
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		7,519,707,000		
3987.EBA.962	Lokasi : KAB. MEMPAWAH Layanan Umum	1.0 Layanan		214,480,000		U
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			214,480,000		
A	Layanan Umum dan Rumah Tangga			214,480,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(567538)

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 8,073,187,000

Halaman : 7

[illegible]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 UNIT KERJA (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 ALOKASI Rp. 8,073,187,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
3987.EBA.994 001 A 511111 						

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567538)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 8,073,187,000	

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.042-Pontianak)			96,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	80,000,000	80,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,000,000	8,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,000,000	8,000,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.042-Pontianak)			36,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	30,000,000	30,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,000,000	3,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,000,000	3,000,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.042-Pontianak)			24,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000,000	2,000,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000,000	2,000,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.042-Pontianak)			27,500,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	25,000,000	25,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,500,000	2,500,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.042-Pontianak)			2,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	500,000	500,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	500,000	500,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.042-Pontianak)			37,370,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	37,370,000	37,370,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.042-Pontianak)			235,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	235,000,000	235,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.042-Pontianak)			60,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,000,000	5,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,000,000	5,000,000	
B	<i>Lembur dan Tunjangan Kinerja</i>			2,642,000,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.042-Pontianak)			235,000,000	RM
	- Uang Lembur PNS	1.0 thn	235,000,000	235,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567538)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 8,073,187,000	

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.042-Pontianak)			2,407,000,000	RM
C	- Tunjangan Kinerja PNS	1.0 Thn	2,407,000,000	2,407,000,000	
	Gaji dan tunjangan PPPK			232,004,000	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK (KPPN.042-Pontianak)			80,000,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	80,000,000	80,000,000	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK (KPPN.042-Pontianak)			4,000	RM
	- Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	4,000	4,000	
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (KPPN.042-Pontianak)			10,000,000	RM
	- Tunjangan istri/suami PPPK	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK (KPPN.042-Pontianak)			4,000,000	RM
	- Tunjangan anak PPPK	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (KPPN.042-Pontianak)			10,000,000	RM
	- Tunjangan fungsional PPPK	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK (KPPN.042-Pontianak)			8,000,000	RM
	- Tunjangan fungsional PPPK	1.0 THN	8,000,000	8,000,000	
511628	Belanja Uang Makan PPPK (KPPN.042-Pontianak)			15,000,000	RM
	- Tunjangan Uang Makan PPPK	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK (KPPN.042-Pontianak)			15,000,000	RM
	- Lembur PPPK	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK (KPPN.042-Pontianak)			90,000,000	RM
	- Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 THN	90,000,000	90,000,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,815,115,000	
A	Langganan Daya dan Jasa			422,338,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.042-Pontianak)			96,775,000	RM
	- Internet Kantor	1.0 thn	96,775,000	96,775,000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.042-Pontianak)			282,363,000	A RM
	- Listrik Kantor	1.0 thn	282,363,000	282,363,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567538)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 8,073,187,000	

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.042-Pontianak)			7,200,000	RM
	- Telepon	12.0 BLN	600,000	7,200,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.042-Pontianak)			36,000,000	RM
	- PDAM	12.0 BLN	3,000,000	36,000,000	
B	<u>Operasional Kendaraan Roda 4</u>			173,040,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.042-Pontianak)			12,000,000	A RM
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	4.0 UNIT	3,000,000	12,000,000	*
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.042-Pontianak)			20,000,000	A RM
	- Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 Insidentil	20.0 HARI	1,000,000	20,000,000	*
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.042-Pontianak)			141,040,000	A RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Lapangan (dobel gardan)	2.0 Unit	36,360,000	72,720,000	*
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Kalimantan Barat)	2.0 Unit	34,160,000	68,320,000	
C	<u>Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2</u>			42,900,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.042-Pontianak)			5,000,000	A RM
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	10.0 UNIT	500,000	5,000,000	*
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.042-Pontianak)			37,900,000	A RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Kalimantan Barat)	10.0 UNIT	3,790,000	37,900,000	*
D	<u>Perawatan Gedung dan Bangunan</u>			293,629,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.042-Pontianak)			293,629,000	A RM
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Kalimantan Barat)	800.0 M2	201,000	160,800,000	*
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Kalimantan Barat)	567.0 M2	136,000	77,112,000	
	- Pemeliharaan Pos Satpam	20.0 M2	136,000	2,720,000	*
	- Pemeliharaan Rumah Genset	34.0 M2	136,000	4,624,000	*
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Laboratorium Basah (Kalimantan Barat)	150.0 M2	136,000	20,400,000	*
	- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Kalimantan Barat)	2543.0 M2	11,000	27,973,000	*
E	<u>Perawatan Sarana Prasarana Kantor</u>			96,531,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567538)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 8,073,187,000	

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.042-Pontianak) - Kalibrasi Alat Laboratorium - Perawatan Alat Laboratorium - Refill Tabung Pemadam 9 KG - Refill Tabung Pemadam 3 KG - Perawatan UPS - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook - Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA - Mesin Fax - Telepon PABX - Perawatan CCTV - Perawatan Aerator - Operasionalisasi Genset	 1.0 PKT 1.0 THN 2.0 UNIT 2.0 UNIT 5.0 UNIT 20.0 UNIT 13.0 UNIT 24.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 THN 2.0 UNIT 12.0 BLN	 22,000,000 10,000,000 500,000 200,000 1,000,000 600,000 690,000 610,000 7,190,000 501,000 510,000 2,020,000 150,000 1,000,000	 22,000,000 10,000,000 1,000,000 400,000 5,000,000 12,000,000 8,970,000 14,640,000 7,190,000 501,000 510,000 2,020,000 300,000 12,000,000	 * * * * * * * * * * * * * *	RM		
F	Operasional Perkantoran			419,875,000				
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.042-Pontianak) - Koran/Majalah/Jurnal - keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Kalimantan Barat) - Keperluan sanitasi laboratorium	 12.0 BLN 1.0 STKR 12.0 bln	 300,000 60,440,000 1,210,000	 3,600,000 60,440,000 14,520,000	 * * *		RM	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.042-Pontianak) - Belanja Pengiriman Dokumen Kedinasan	 1.0 thn	 10,007,000	 10,007,000	 * A			RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 8,073,187,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.042-Pontianak)			101,484,000	A
	> Honorarium Pengelola Satker			77,640,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	1,550,000	31,080,000	*
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	1,510,000	11,880,000	*
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	600,000	10,320,000	*
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	520,000	10,320,000	*
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	390,000	14,040,000	*
	> Honorarium Pengelola PNB			7,644,000	
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta)	12.0 OB	260,000	2,100,000	*
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta)	12.0 OB	200,000	1,728,000	*
	- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	200,000	3,816,000	*
	> SAI UAKPA - UAKPB			16,200,000	
	- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	12.0 OB	200,000	3,600,000	*
	- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	12.0 OB	200,000	3,000,000	*
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	12.0 OB	150,000	2,400,000	*
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	150,000	3,600,000	*
	- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	12.0 OB	180,000	3,600,000	*
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.042-Pontianak)			3,880,000	A
	- Pas Kendaraan Roda 2	6.0 UNIT	200,000	1,200,000	*
	- Pas Kendaraan Dinas Roda 4	2.0 UNIT	490,000	980,000	*
	- Pas Bandara	17.0 ORG	100,000	1,700,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.042-Pontianak)			8,160,000	A
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12.0 OB	680,000	8,160,000	*
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.042-Pontianak)			182,784,000	A
	- ATK	12.0 BLN	7,500,000	90,000,000	*
	- Komputer Supplies	12.0 BLN	6,890,000	82,680,000	*
	- Barang cetakan	12.0 BLN	842,000	10,104,000	*
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.042-Pontianak)			35,000,000	A
	- Sewa Gedung Arsip	1.0 THN	35,000,000	35,000,000	*
G	<u>Pengadaan Pakaian Dinas</u>			60,478,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567538)	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 8,073,187,000	

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.042-Pontianak)			60,478,000	A
	- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Kalimantan Barat) [25 Peg x 2 Stel]	50.0 STEL	922,000	46,100,000	*
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti [26 org x 1 stel]	26.0 STEL	553,000	14,378,000	*
H	<i>Pengadaan Makan dan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			91,200,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.042-Pontianak)			91,200,000	A
	- Penambah Daya Tahan Tubuh (Kalimantan Barat) [20 ORG x 20 HR x 12 BLN]	4800.0 OH	19,000	91,200,000	*
I	<i>Pertemuan/jamuan/Delegasi/Tamu/Misi</i>			102,000,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.042-Pontianak)			102,000,000	A
	- Jamuan Makan Tamu	12.0 BLN	8,500,000	102,000,000	*
K	<i>Medical Check Up/Pemeriksaan kesehatan</i>			30,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.042-Pontianak)			30,000,000	A
	- Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	30.0 ORG	1,000,000	30,000,000	*
L	<i>Honorarium PPNPN dan Outsourcing</i>			1,083,124,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.042-Pontianak)			672,868,000	A
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kalimantan Barat [16 Org x 12 Bln]	192.0 OB	3,061,000	587,712,000	*
	- Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti [3 org x 90 hr x 8 jam]	2160.0 OJ	13,000	28,080,000	*
	- THR Pramubhakti [16 Org x 1 Bln]	16.0 OB	3,061,000	48,976,000	*
	- Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti [3 org x 90 hr]	270.0 OH	30,000	8,100,000	*
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.042-Pontianak)			410,256,000	
	- Honorarium Satpam dan Pengemudi Kalimantan Barat [9 org x 12 bln]	108.0 OB	3,368,000	363,744,000	
	- THR PJLP Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan dan Administrasi	9.0 Org	3,368,000	30,312,000	
	- BPJS Kesehatan [9 org x 12 bln]	108.0 Org	150,000	16,200,000	
3987.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		154,480,000	
Lokasi : KAB. MEMPAWAH					
3987.EBD.952	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Dokumen		110,688,000	
051	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>			110,688,000	U
A	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>			110,688,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.042-Pontianak)			36,472,000	A
	- ATK	12.0 bln	3,000,000	36,000,000	*
	- Penggandaan	1.0 Pkt	472,000	472,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567538) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 8,073,187,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.042-Pontianak) > Rapat Teknis Perencanaan, Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Operasional - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [6 OK x 3 Hari] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [6 OK x 4 Hari] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	18.0 OH 24.0 OH 6.0 OK	703,800 530,000 2,781,000	42,074,000 42,074,000 12,668,000 12,720,000 16,686,000	A * * *	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.042-Pontianak) - Transport Revisi DIPA/Konsultasi/Bimtek/Sosialisasi Kanwil DJPB Kalbar	6.0 Ok	150,000	900,000 900,000	A *	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.042-Pontianak) > Perdin Finalisasi RKAKL, Perdin Rakernis, - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Barat) [6 Ok x 2 Kali] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 ok x 2 Kali] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) - Uang Saku Fullboard [6 OK x 5 hari] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	12.0 OK 12.0 OK 6.0 OH 30.0 OH 6.0 OK	142,000 256,000 730,000 180,000 2,781,000	31,242,000 31,242,000 1,704,000 3,072,000 4,380,000 5,400,000 16,686,000	A * * * * *	RM
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		43,792,000		
051	Layanan Manajemen Keuangan			43,792,000	U	
A	Layanan Manajemen KEuangan			15,743,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.042-Pontianak) - ATK	1.0 pkt	3,639,000	3,639,000 3,639,000	A *	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.042-Pontianak) - Transport Pengantar SPM/Rekon LPJ/Rekon/Koordinasi KPPN [2 org x 6 kali]	12.0 OK	150,000	1,800,000 1,800,000	A *	PNP
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.042-Pontianak) - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Barat) [2 Ok x 2 Kali] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ok x 2 Kali] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) - Uang Saku Fullboard [2 OK x 5 hari] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK > Perdin Rekonsiliasi SAIBA	4.0 OK 4.0 OK 2.0 OH 10.0 OH 2.0 OK	142,000 228,500 730,000 180,000 2,781,000	10,304,000 568,000 914,000 1,460,000 1,800,000 5,562,000 0	A * * * * *	PNP
B	Penyusunan Manajemen RESiko			28,049,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(567538)

Rp. 8,073,187,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.042-Pontianak) > Perdin Penyusunan Manajemen Resiko - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [4 OK x 3 Hari] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [4 OK x 4 Hari] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	12.0 OH 16.0 OH 4.0 OK	703,800 530,000 2,781,000	28,049,000 28,049,000 8,445,000 8,480,000 11,124,000	A * * *
					PNP

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Kubu Raya, 24 Februari 2025

KPA

Kepala Satker

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN KARANTINA IKAN

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

PONTIANAK

REPUBLIK INDONESIA

JIMMY YONATHAN ELWAREN, S.ST.PI

NIP 197701242005021001